

ANALISA KORELASI INFLASI, *ECONOMIC GROWTH*, *ECONOMIC STRUCTURE*, DAN *TAX RATE* TERHADAP *TAX REVENUE* DI NEGARA-NEGARA ASEAN

Richard dan Agus Arianto Toly

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email: richard_lim@windowslive.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi dari *inflasi*, *economic growth*, *economic structure* serta *tax rate* terhadap *tax revenue* di negara-negara Asean. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan penelitian ini menggunakan data sekunder mengenai *inflasi*, *economic growth*, *economic structure*, *tax rate*, serta *tax revenue* yang diperoleh melalui website world bank yaitu <http://data.worldbank.org>. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara-negara Asean tahun 2002 sampai dengan 2012. Penelitian ini menggunakan uji korelasi untuk meneliti hubungan dengan alat bantu SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Inflasi* tidak berkorelasi signifikan terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. *Economic Growth* tidak berkorelasi signifikan terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. *Economic Structure* memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. *Tax Rate* memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Kata kunci: *inflasi*, *pertumbuhan ekonomi*, *struktur ekonomi*, *tarif pajak* dan *pajak penghasilan*.

ABSTRACT

This study aimed to determine the affect of inflation, economic growth, economic structure and tax revenue to the tax ratio in Asean countries. This research was a quantitative study by using secondary data of inflation, economic growth, economic structure, tax rate, and tax revenue obtained through the World Bank website ie <http://data.worldbank.org>. The sample used in this study was the ASEAN countries from 2002 to 2012. This study using pearson correlation analysis with SPSS tools. The results showed that inflation was not significantly correlated to the tax revenue of Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. Economic Growth was not correlated significantly to tax revenue Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. Economic Structure has a positive and significant correlation to the tax revenue of Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. Tax Rate had negative and significant correlation to the tax revenue of Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines.

Keywords: *inflation, economic growth, economic structure, tax rate, tax revenue.*

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 1980-an, pemerintah Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas karena turunnya harga minyak internasional (Sinaga, 2010). Salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi andalan utama pemerintah sejak saat itu adalah pajak. Dari keseluruhan penerimaan negara, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan negara. Penerimaan Indonesia memang didominasi oleh pajak, tetapi rasio penerimaan perpajakan dibandingkan dengan GDP atau yang lebih dikenal dengan istilah *tax ratio* masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Disisi lain, penggunaan *tax ratio* sebagai ukuran kinerja penerimaan pajak juga diperdebatkan karena bersifat kontradiktif dengan data dan fakta ekonomi lainnya. Imam Sugema (*Tempo*, 7 September 2004, dalam penelitian Setiaji, 2005) mempertanyakan penerimaan pajak yang tinggi tetapi berasosisasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah, yang ditunjukkan oleh fakta bahwa selama orde baru, *tax ratio* sebesar 7,4 persen namun pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) mencapai 6,1 persen. Saat pemerintahan Abdurrahman Wahid, rasio pajak mencapai 10,7 persen namun pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,8 persen, dan saat pemerintahan Megawati, *tax ratio* mencapai 13,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi terus menurun mencapai 4,2 persen. Dalam artikel Sunarsip "Mega Fakta dan Mega Ilusi" di Harian Republika 8 September 2004, beliau menyatakan bahwa pengukuran berdasarkan angka nominal cenderung bias karena tidak mempertimbangkan aspek inflasi.

Dalam penelitian Chenery (1975), sejalan dengan peningkatan pendapatan, perekonomian suatu negara dapat bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Gambaran kondisi struktur ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan GDP. Dan semakin tingginya kontribusi sektor industri, maka dapat mengindikasikan kemajuan pembangunan negara tersebut (Kaufmann, 2012). Negara-negara ASEAN dapat digolongkan sebagai negara yang sedang berkembang karena tingginya kontribusi sektor industry.

Setiap individu yang membayar pajak dalam suatu negara berharap dengan adanya dana yang mereka berikan kepada negara dapat menjadi sumber dana yang dapat dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara mereka, karena tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (Holik, 2005). Cobham (2007) dan Fjeldstad (2008) juga mengatakan, "*Being a major and vital source of revenue, a sound taxation system is imperative for the public finances of a country and improving citizen participation whether that is in any stage of the progressive process, developing, developed or transitional.*". Oleh karena itu, pendapatan pajak harus diawasi dengan baik sehingga keperluan pembangunan negara dapat dibiayai dan selebihnya dapat menjadi tabungan negara. Carroll (2008) menemukan bukti bahwa *tax rate* yang rendah mempengaruhi pembayar pajak untuk melaporkan lebih besar penghasilan/pendapatan kena pajaknya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan besarnya pengenaan tarif pajak (*tax rate*) juga berpengaruh terhadap memaksimalkan potensi pendapatan pajak suatu negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah inflasi berkorelasi terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina?
2. Apakah *economic growth* berkorelasi terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina?
3. Apakah *economic structure* berkorelasi terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina?
4. Apakah *tax rate* berkorelasi terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina?

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga umum secara terus menerus (Murni 2006:203). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali kenaikan tersebut bersifat meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar harga barang lain.

Penggolongan inflasi Pratomo (2006:107-110), berdasarkan parah-tidaknya inflasi sebagai berikut :

1. Inflasi ringan, yaitu di bawah 10% per tahun;
 2. Inflasi sedang, yaitu 10%-30% per tahun;
 3. Inflasi berat, yaitu 30%-100% per tahun; dan
 4. Hiperinflasi, yaitu di atas 100% per tahun.
1. Akibatnya terhadap perekonomian
 - Menggalakkan spekulasi penanaman modal
 - Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi

- Tingkat defisit dalam neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri.
2. Akibatnya kepada individu dan masyarakat
 - Memperburuk distribusi pendapatan
 - Pendapatan riil merosot dan nilai tabungan juga merosot
- Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi dapat berupa: kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan dasar segi penawaran (Sukirno, 2004).
- a. Kebijakan fiskal, yaitu dengan menambahnya pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
 - b. Kebijakan moneter, yaitu dengan mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
 - c. Dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi

Economic Growth

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1991), secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Rahmananta (2009) mengatakan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat ekonomi yang dicapai tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai dari seluruh produksi nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, biasanya

setiap tahun (Soebagiyo, 2007). GDP mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP sering digunakan sebagai salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu negara dan dapat dibandingkan antara satu negara dengan yang lain dengan mengkonversikannya menjadi satu mata uang yang sama (Gregori, 2011). Di dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah penambahan produk domestik bruto yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001:38). Semakin tinggi pendapatan, maka akan disertai dengan peningkatan penerimaan pajak dalam negara tersebut (Nugroho, 2013).

Economic Structure

Menurut teori ekonomi pembangunan, semakin tinggi kontribusi sektor industri terhadap perekonomian negaranya, maka negara tersebut akan maju. Pada negara maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. BPS mencatat bahwa pada negara berkembang seperti Indonesia, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Dengan kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri, menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara dari sektor pertanian ke sektor industri (Yunizar, 2007). Dengan begitu, pendapatan negara dari segi pajak dapat ditingkatkan.

Kuncoro (2006) juga mengatakan bahwa pembangunan adalah "suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi

pendapatan tidak semakin timpang." Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan dalam hal:

1. Perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa
2. Perubahan dalam kelembagaan baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri.

Adanya perubahan struktural dapat tercermin dalam peranan sektor-sektor dalam pembentukan produksi nasional maupun besarnya persentase tenaga kerja pada masing-masing sektor ekonomi tersebut. Dimana peranan ataupun sumbangan sektor primer (pertanian dan pertambangan) dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan semakin berkurang, sedangkan peranan sektor sekunder (industri manufaktur, konstruksi) serta sektor tersier (jasa-jasa) akan semakin meningkat, dengan semakin majunya perekonomian negara. Disamping itu, semakin tinggi pendapatan perkapita suatu negara, akan semakin kecil peranan pertanian dalam menyediakan dan menyerap kesempatan kerja, dan sebaliknya sektor industri akan semakin penting dan meningkat peranannya dalam menampung tenaga kerja. (Kamaludin, 1999).

Pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang, mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional, akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke sektor modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer khususnya industri manufaktur dengan *increasing returns to scale* (relasi positif antara pertumbuhan output dengan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001), sehingga

terdapat suatu kolerasi yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan struktur ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat (*demand side effect*).

Tax Rate

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak kepada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak (Caroll, 2008). Bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Kenny (2006) mengatakan bahwa *tax rate* yang rendah mempengaruhi pembayar pajak untuk melaporkan lebih besar penghasilan kena pajaknya. Oleh karena itu, kebijakan besarnya pengenaan *tax rate* berpengaruh terhadap upaya memaksimalkan potensi pendapatan pajak suatu negara. Asas-asas yang harus dipenuhi yaitu:

1. Asas Legal: Setiap pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang.
2. Asas Kepastian Hukum: Ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keraguan
3. Asas Efisien: Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus dikalkulasi secara cermat sehingga jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan..
4. Asas Non Distorsi: Pajak tidak boleh menimbulkan distorsi dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, misalnya alokasi sumber daya dan inflasi.
5. Asas Sederhana: Pajak harus sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiskus maupun wajib pajak.

Simanjuntak (2012:32) mengungkapkan bahwa hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) dengan penerimaan negara dari sektor pajak terjadi karena perubahan dalam tarif pajak mempunyai dua efek terhadap penerimaan negara yaitu *arithmetic effect* dan *economic effect*. *Arithmetic effect* adalah ketika tarif pajak rendah, maka penerimaan pajak rendah dan begitu juga sebaliknya. *Economic effect* dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam kegiatan ekonomi (*output*) yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak. Apabila tarif pajak dinaikkan, maka *multiplier effect*-nya akan bersifat negatif terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila tarif diturunkan, maka *multiplier effect*-nya akan bersifat positif terhadap kegiatan ekonomi.

Tax Revenue

Definisi pajak dari P.J.A Abdriani yang dikutip oleh Sukardji (2009:1) yaitu "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." Menurut Siahaan (2010), sistem pemugutan pajak yang digunakan ada tiga, yaitu :

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada WP untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang dari WP.

Pendapatan pajak (*tax revenue*) adalah pajak yang diterima oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan umum, denda dan kontribusi *social security* dikecualikan dari penghasilan. Restitusi dan kompensasi pajak diperlakukan sebagai pengurang pendapatan pajak

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan antar negara anggotanya. Sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Salah satu hasil pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN yang berlangsung di Bali pada bulan April 2011 adalah pembentukan ASEAN Tax Forum. Tujuan pembentukan ASEAN Tax Forum untuk memperkuat kerjasama dalam bidang perpajakan, pertukaran informasi antar negara ASEAN mengenai ketentuan perpajakan, menghindari terjadinya pajak berganda, dan menangani withholding tax untuk membangun komunitas ASEAN yang lebih kompetitif. Dengan

sistem perpajakan yang selaras antar negara ASEAN, maka ASEAN sebagai suatu komunitas ekonomi dapat menjadi kawasan yang mampu bersaing dengan kawasan ekonomi yang lain (Effendi, 2011). ASEAN sering dijadikan pembanding dalam perekonomian termasuk keberhasilan pemungutan pajak. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan negara pendiri ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina dalam penelitian.

Hipotesis Penelitian

Salah satu kendala yang banyak dialami oleh berbagai negara dalam perekonomian adalah masalah inflasi, terlebih jika yang terjadi tingkat inflasi tinggi. Inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor impor, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan, dan penerimaan pajak (Nersiwad, 2002). Berdasarkan pernyataan tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ada korelasi antara inflasi dengan *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

H₀: Tidak ada korelasi antara inflasi dengan *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut mengalami kenaikan. Oleh karena itu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan output dilakukan dengan menggunakan perubahan nilai moneter (uang) yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto. Semakin tinggi nilai Produk Domestik Bruto maka pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat melalui penerimaan pajak

penghasilan dan pajak lainnya (Rahmanta, 2009). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Ada korelasi antara *economic growth* dengan *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

H₀: Tidak ada korelasi antara *economic growth* dengan *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Peranan sektor industri dalam berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki keunggulan dalam pembangunan negara, diantaranya adalah dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) yang tinggi pada komoditas yang dihasilkan (Anwar, 2007). Dengan begitu, pendapatan negara dari segi pajak dapat ditingkatkan. Sehingga didapatkan hipotesis :

H₃: Ada korelasi antara *economic structure* dengan *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

H₀: Tidak ada korelasi antara *economic structure* dengan *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Simanjuntak (2012:32) mengungkapkan bahwa hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) dengan penerimaan negara dari sektor pajak terjadi karena perubahan dalam tarif pajak mempunyai dua efek terhadap penerimaan negara yaitu *arithmetic effect* dan *economic effect*. *Arithmetic effect* adalah ketika tarif pajak rendah, maka penerimaan pajak rendah dan begitu juga sebaliknya. *Economic effect* dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam kegiatan ekonomi (*output*) yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak. Apabila tarif pajak dinaikkan, maka *multiplier effect*-nya akan bersifat negatif terhadap

kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila tarif diturunkan, maka *multiplier effect*-nya akan bersifat positif terhadap kegiatan ekonomi, sehingga diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ada korelasi antara *tax rate* dengan *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

H₀: Tidak ada korelasi antara *tax rate* dengan *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode uji korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang akan diuji adalah tingkat inflasi, *economic growth*, *economic structure*, dan *tax rate* suatu negara dibandingkan dengan variabel dependen yaitu *tax revenue*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari Website World Bank (<http://data.worldbank.org>) untuk memperoleh data inflasi, *economic growth*, *economic structure*, *tax rate*, dan *tax revenue*.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dan mengumpulkan data sekunder yang relevan tahun 2002-2012 dari negara-negara yang menjadi sampel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Sampel dalam penelitian ini adalah negara-negara yang menjadi pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina dengan

menggunakan jangka waktu 10 tahun yang dimulai dari tahun 2002 sampai dengan 2012.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan negara didasarkan pada regional Asia Tenggara (ASEAN).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Penelitian hanya dilakukan kepada negara-negara pendiri ASEAN.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Pearson

Normalitas

Data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa uji asumsi normalitas baik negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand maupun Filipina telah terpenuhi.

Multikolinieritas

Semua $VIF < 10$, ini berarti, tidak terjadi multikolinieritas dan menyimpulkan bahwa uji multikolinieritas ke-5 negara sampel telah terpenuhi.

Heterokedastisitas

Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini membuktikan ke-5 negara sampel tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Statistik Deskriptif

Pearson Correlation Indonesia

Inflasi dan *economic growth* memiliki hubungan yang negatif dan sangat lemah terhadap *tax revenue* yaitu masing-masing sebesar 0,101 dan 0,195. *Economic structure* memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan tingkat signifikansi 5%,

sedangkan *tax rate* memiliki hubungan yang negatif dan sangat kuat terhadap *tax revenue*.

Pearson Correlation Malaysia

Inflasi dan *economic growth* memiliki hubungan yang negatif dan sangat lemah terhadap *tax revenue* yaitu masing-masing sebesar 0,164 dan 0,141. *Economic structure* memiliki hubungan positif dan sangat kuat terhadap *tax revenue* dengan nilai 0,817 dan tingkat signifikansi 1%. Angka korelasi *tax rate* menunjukkan hubungan negatif dengan *tax revenue* dengan nilai 0,792.

Pearson Correlation Singapura

Inflasi memiliki hubungan yang negatif dan kuat terhadap *tax revenue* yaitu sebesar 0,589. Untuk hubungan *economic growth* dan *tax revenue* terlihat negatif dan sangat lemah yaitu sebesar 0,096. *Economic structure* memiliki hubungan yang positif dan sangat kuat sekali terhadap *tax revenue* dengan tingkat signifikansi 1%, dan *tax rate* memiliki hubungan yang negatif dan sangat kuat terhadap *tax revenue*.

Pearson Correlation Thailand

Inflasi dan memiliki hubungan yang positif dan kuat terhadap *tax revenue*. Untuk hubungan *economic growth* dan *tax revenue* terlihat negatif dan sangat lemah yaitu sebesar 0,191. *Economic structure* memiliki hubungan negatif dan sangat kuat terhadap *tax revenue* dengan nilai 0,861 pada tingkat signifikansi 1%, *tax rate* sendiri memiliki hubungan yang negatif dan kuat terhadap *tax revenue* dengan nilai 0,675 pada tingkat signifikansi 5%.

Pearson Correlation Filipina

Inflasi dan memiliki hubungan yang positif dan lemah terhadap *tax revenue*. Untuk hubungan

economic growth dan *tax revenue* terlihat negatif dan sangat lemah yaitu sebesar 0,127. *Economic structure* memiliki hubungan positif dan sangat kuat terhadap *tax revenue* dengan nilai 0,863 pada tingkat signifikansi 1%, *tax rate* sendiri memiliki hubungan yang negatif dan kuat terhadap *tax revenue* dengan nilai 0,608 pada tingkat signifikansi 5%.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis Indonesia

- H₁ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,768 > 0,05, maka H₀ diterima.
- H₂ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,418 > 0,05, maka H₀ ditolak.
- H₃ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,013 < 0,05, maka H₀ ditolak.
- H₄ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,003 < 0,05, maka H₀ ditolak.

Uji Hipotesis Malaysia

- H₁ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,630 > 0,05, maka H₀ diterima.
- H₂ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,680 > 0,05, maka H₀ diterima.
- H₃ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,002 < 0,05, maka H₀ ditolak.
- H₄ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,004 < 0,05, maka H₀ ditolak.

Uji Hipotesis Singapura

- H₁ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,057 > 0,05, maka H₀ diterima.

- H₂ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,778 > 0,05, maka H₀ diterima.

- H₃ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,000 < 0,05, maka H₀ ditolak.

- H₄ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,004 < 0,05, maka H₀ ditolak

Uji Hipotesis Thailand

- H₁ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,152 > 0,05, maka H₀ diterima.

- H₂ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,574 > 0,05, maka H₀ diterima.

- H₃ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,001 < 0,05, maka H₀ ditolak.

- H₄ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,023 < 0,05, maka H₀ ditolak.

Uji Hipotesis Filipina

- H₁ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,307 > 0,05, maka H₀ diterima.

- H₂ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,710 > 0,05, maka H₀ diterima.

- H₃ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,001 < 0,05, maka H₀ ditolak.

- H₄ didapatkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) yaitu 0,047 < 0,05, maka H₀ ditolak.

Temuan dan Interpretasi

Disimpulkan bahwa inflasi tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan *tax revenue* pada semua negara. Ketidaksesuaian antara teori dengan hasil dikarenakan inflasi yang terjadi di dalam sebelas

tahun terakhir adalah inflasi yang berasal dari faktor eksternal seperti naiknya harga bahan bakar minyak yang menyebabkan naiknya harga komoditas lainnya. Hal tersebut menciptakan dampak inflasi yang terjadi tergolong rendah yaitu dibawah 10%, kecuali pada Indonesia yang dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memberikan subsidi atas bahan bakar yang terbesar di Asia (National Geographic, 2012). Dampak dari inflasi tersebut adalah menyebabkan naiknya harga barang lain dan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang memiliki pendapatan tetap karena dengan penghasilan yang relatif tetap, mereka tidak dapat menyesuaikan pendapatannya dengan kenaikan harga yang disebabkan karena inflasi, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi pendapatan pajak terutama pajak penghasilan yang dimana memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak (Syafrudin, 2010).

Ditemukan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara *economic growth* terhadap *tax revenue*. Ketidaksihesuaian antara teori dan hasil dikarenakan *economic growth* menjelaskan pertumbuhan produk domestik bruto secara global, namun tidak selalu mencerminkan kesejahteraan penduduk dengan meratanya pendapatan per kapita (Naibaho, 2012). bahwa pada tahun 2011, Indonesia memiliki *economic growth* yang tertinggi dibandingkan negara-negara lainnya yaitu 6,49%. Namun ketika dilihat dari besarnya pendapatan perkapita pada tahun yang sama pada Gambar 4.2, didapatkan bahwa pendapatan perkapita Indonesia sebesar \$3.494 menduduki peringkat ke empat setelah Thailand sebesar \$4.972 yang memiliki *economic growth* hanya 0,07% pada tahun 2011. Tarigan (2007:46) menjabarkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan *output*

perkapita dalam jangka panjang dan pertumbuhan *output* itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertumbuhan jumlah penduduk serta ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan berlanjut. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan tingginya *economic growth* tidak selalu menggambarkan meratanya pendapatan per kapita yang dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Hasil dari korelasi *economic structure* dengan *tax revenue* adalah korelasi positif yang signifikan, hal ini sesuai dengan teori bahwa peranan sektor industri dalam berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki keunggulan dalam pembangunan negara, diantaranya adalah dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi pada komoditas yang dihasilkan (Anwar, 2007). Dengan kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri dapat menghasilkan produksi nasional meningkat, dengan begitu pendapatan negara dari segi pajak dapat ditingkatkan (Sukirno, 2007).

Simanjuntak (2012:32) mengungkapkan bahwa hubungan antara tarif pajak (*tax rates*) dengan penerimaan negara dari sektor pajak terjadi karena perubahan dalam tarif pajak mempunyai dua efek terhadap penerimaan negara yaitu *arithmetic effect* dan *economic effect*. *Economic effect* dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam kegiatan ekonomi (*output*) yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak. Apabila tarif pajak dinaikkan, maka *multiplier effect*-nya akan bersifat negatif terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila tarif diturunkan, maka *multiplier effect*-nya akan bersifat positif terhadap kegiatan ekonomi. *Tax rate* memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap *tax revenue* di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan

Filipina. Hal itu sesuai dengan teori bahwa kebijakan besarnya pengenaan *tax rate* berpengaruh terhadap upaya memaksimalkan potensi pendapatan pajak suatu negara (Kenny, 2006).

KESIMPULAN DAN SARAN

Inflasi tidak berkorelasi signifikan terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Economic Growth tidak berkorelasi signifikan terhadap *tax revenue* Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Economic Structure memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Tax Rate memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap *tax revenue* Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Saran

Dengan adanya penelitian ini, dapat dilihat bahwa faktor-faktor makro ekonomi berkorelasi dalam penerimaan pajak negara. Terutama dari sisi *economic structure* telah dibuktikan bahwa memiliki hubungan yang positif dan signifikan pada pendapatan pajak Indonesia. Diharapkan agar negara Indonesia dapat terus meningkatkan pendapatan dari sektor industri agar dapat menjaring pendapatan pajak yang lebih daripada tahun sebelumnya.

Dengan adanya penelitian yang dilakukan di negara ASEAN, sebaiknya dapat dilakukan untuk negara-negara lain untuk melihat apakah penelitian ini dapat digeneralisasi untuk semua negara.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu variabel yang di uji hanyalah 4 variabel independen saja. Selain itu, data yang digunakan hanya bersumber dari 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina serta hanya dengan menggunakan 11 tahun sehingga, untuk melakukan uji statistik, data yang dipakai sangat terbatas jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., Yunizar, Nidar, H. S. R. (2007). *Identifikasi Sektor Industri dan Peranannya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut*.
- Caroll, R. (2008, Agustus). The 2001 and 2003 Tax Relief: The Benefits of lower tax rates. Tax Foundation, Fiscal Fact, No.141.
- Chenery, H.B., Syrquin, M. (1975). *Patterns of Development 1950 – 1970*. London: Oxford University Press.
- Darmayasa, N., Hardika, N. S. (2011, November). Perencanaan Pajak Dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 7 (no. 3).
- Gupita, L. P., Nugroho, S.B.M. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011. *Diponegoro Journal of Economics*, vol. 2 (no. 2) p. 1.
- Gregori, T., Pietroforte, R. (2011, Juni). *Patterns of Structural Changes in Construction?*. Amsterdam: The Netherlands.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate*

- Dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2006). *Essential of Econometrics*. Third Edition. McGraw-Hill International
- Holik, D. S. (2005). Foreign Trusts, 2002. *Statistics of Income Bulletin*, 25:134 – 150.
- Husin, S. (2012). *Dampak Inflasi dan Pengangguran Terhadap Perekonomian*
- Kaufmann, D., A. Kraay and M. Mastruzzi (2012). *Governance Matters IV: Governance Indicators For 1996 – 2011*. World Bank *Working Paper*.
- Masters, M., Oh, C. (2006). Controlled Foreign Corporations, 2002. *Statistics of Income Bulletin*, 25:193 – 232.
- Murni, A. (2006). *Ekonomika Makro*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Nasution, C. S. (2003, Juni). Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, vol. 7 (no. 2).
- Neriswad (2002, Februari). Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Riil Penerimaan Pajak Negara: Pendekatan Elastisitas dan Tax Collection Lags di Indonesia. *Jurnal Analisa Kebijakan Vol.1 No.1*
- Nugroho, B. A. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*, Edisi Pertama. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pratomo, W.A. (2006). *Teori Ekonomi Makro*. Medan: Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Rahmanta (2009). Pengaruh Produk Domestik Bruto dan SBI Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *QE Journal*, vol. 1 (no. 1).
- Sari, P. P. (2009). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Tingkat Inflasi Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Wilayah Jakarta Selatan.
- Setiaji, G., Amir, H. (2005, November). Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Sinaga, A. R. (2010, Januari). Pengaruh Variabel – Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia.
- Simanjuntak, H. T., Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sudjana (1983). *Teknik Analisis Korelasi dan Regresi*. Bandung: Tarsito
- Sugiono (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas
- Soebagiyo, D. (2007, Desember). Kausalitas Granger PDRB terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Dati I Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 8 (no. 2) p. 177 – 192.
- Soemitro, R., Sugiharti, D.K. (2007). *Asas dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama.
- Tarigan (2007). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tambunan, T. T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.